BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Tahapan dalam program PLPBK meliputi tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Sebahagian dari tahapan program PLPBK tidak terjadi proses komunikasi partisipatif, dimana proses komunikasi yang berlangsung antara komunikator dan komunikantidak terjadi dialog sehingga tidak muncul adanya pengertian bersama (*mutual understanding*). Sebagai komunikator adalah tim korkot, TAPP dan ninik mamak, komunikan adalah Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai pelaksana program PLPBK di Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung dan masyarakat sebagai penerima manfaat dari pembangunan fisik yang dilaksanakan berupa satu paket peningkatan jalan (pelebaran jalan, drainase dan trotoar). Informasi dan pengetahuan yang disampaikan dirancang menggunakan *power point,* ditayangkan dengan bantuan media *infocus,* dan disampaikan secara verbal dan ada juga menggunakan kertas plano.

Proses komunikasi pada tahapan pelaksanaan program PLPBK terlihat sebagian belum efektif dan belum sesuai dengan model komunikasi partisipatif. Dialog sebagai ciri komunikasi partisipatif belum terjadi pada sebagian tahapan proses program PLPBK. Faskel sebagai perpanjangan tangan pemerintah masih

terlihat melakukan intervensi dan proses komunikasi yang terjadi masih bersifat *top down*. Pada tahap persiapan, sosialisasi yang dimulai di tingkat kabupaten belum berjalan efektif karena ada beberapa komunikan yang tidak memahami sebagian pesan yang disampaikan oleh komunikator. Penyebabnya adalah penyampaian komunikator yang agak kaku dan ada beberapa istilah yang tidak dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, selain itu PLPBK merupakan hal yang baru bagi sebagian besar komunikan, terutama yang berasal dari Nagari Solok Ambah. Sedangkan pada sosialisasi tingkat nagari, proses komunikasi terlihat efektif.

Pada tahap perencanaan, proses komunikasi yang terjadi belum efektif. Adanya penggiringan opini sejak proses awal dalam penentuan pembangunan fisik. Saat melaksanakan refleksi perkara kritis, faskel sebagai komunikator tidak memberikan pembelajaran kepada TIPP (bertindak sebagi komunikan) dalam menemukenali permasalahan permukiman yang ada di sekitarnya. TIPP tidak kritis terhadap permasalahan permukiman yang sedang mereka hadapi karena langsung diberikan kriterianya oleh faskel.

Pada tahap pelaksanaan, proses komunikasi partisipatif terlihat saat ninik mamak dilibatkan dalam hal penyampaian tanah masyarakat yang terpakai untuk pembangunan fisik. Karena ninik mamak digunakan sebagai perantara kepada masyarakat maka secara umum masyarakat merelakan tanahnya untuk pembangunan program PLPBK. Ninik mamak dalam Nagari Solok Ambah masih memegang peranan yang cukup penting. Namun, dalam tahap pelaksanaan ada salah seorang anggota masyarakat yang tanahnya terpakai marah-marah saat

pekerja melakukan penggalian tanah. Kasalahpahaman tidak akan terjadi jika sebelumnya warga tersebut bahwa tanahnya terpakai untuk pembangunan pelebaran jalan dan dilakukan dialog sehingga warga tersebut dapat memahami dengan baik seperti apa hasil dari pekerjaan.

Beberapa hambatan selama proses komunikasi yang kemudian mempengaruhi kelancaran komunikasi dalam pelaksanaan Program PLPBK di nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung yang utama adalah dipengaruhi faktor psikologis, dimanasecara umum masyarakat nagari Solok Ambah tidak kritis dan menerima saja setiap keputusan yang ada sehingga pada saat penentuan pembangunan fisik, masyarakat menerima saja usulan yang disampaikan oleh tim korkot untuk pembangunan jalan. Faktor kharakteristik perilaku khalayak yaitu, perilaku komunikasi TIPP dan BKM yang tidak aktif mencari informasi tentang PLPBK termasuk juga akses informasi yang diberikan tim korkot terbatas. Sedangkan faktor sosiodemografi adalah tingkat pendidikan TIPP yang rendah sehingga tidak memahami seutuhnya pesan yang disampaikan oleh tim korkot.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

5.2. Saran

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan lainnya, pelaksana perlu memastikan bahwa informasi dan pengetahuan yang diterima masyarakat mengenai program memadai dan dipahami dengan baik, sehingga pelaksanaannya dapat dijalankan secara konsisten dan kontinu. Hal tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengkaji kondisi sosiodemografi komunikan sasaran, serta dalam mengkomunikasikan program pemberdayaan kepada masyarakat, pelaksana

program khususnya faskel perlu memiliki perencanaan atau strategi komunikasi sebagai pedoman dan panduan, sehingga hambatan dapat diminimalisir dan komunikasi menjadi efektif.

Untuk selanjutnya perlu dilakukan penelitian untuk mengukur efektifitas komunikasi partisipatif dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA